

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang berperan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum (Pasolong, 2023). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai tahapan awal dalam sistem peradilan hukum pidana di Indonesia. Proses penegakan hukum diawali dengan proses penyidikan. Penyidikan dilakukan guna membuat terang suatu tindak pidana dan terciptanya keadilan. Proses penegakan hukum yang profesional dan adil maka semua tindakan penyidik haruslah tepat. Hasil penyidikan akan memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat

Polda Jawa Timur (Polda Jatim) berfungsi sebagai kepanjangan tangan Mabes Polri di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, keputusan strategis yang dibuat oleh perwira pertama (Pama) di Polda Jatim menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan meningkatnya kompleksitas tantangan sosial dan dinamika keamanan wilayah Jawa Timur, kemampuan setiap personel menjadi semakin krusial dan menentukan citra Polri di mata publik (Pasolong, 2023).

Pada praktik operasional, keterbatasan rasionalitas dan persepsi risiko yang tinggi sering tercermin dalam berbagai situasi nyata di lapangan. Salah satu contoh konkret adalah lambatnya proses olah tempat kejadian perkara (TKP) akibat keterbatasan saksi dan minimnya bukti awal. Dalam beberapa kasus, Pama harus

mengambil keputusan cepat terkait pengamanan lokasi, penetapan status kejadian, atau penentuan langkah lanjutan penyidikan, meskipun informasi yang tersedia masih sangat terbatas.

Sejumlah kasus di Indonesia menunjukkan bahwa respon aparat penegak hukum terhadap laporan dan olah tempat kejadian perkara (TKP) tidak selalu berjalan cepat sesuai harapan Masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul di ruang publik adalah ungkapan “*no viral, no justice*”, yang mencerminkan persepsi luas bahwa sebuah kasus sering kali baru ditangani secara serius setelah mendapat sorotan yang besar melalui media social (Antara, 2025). Kritik terhadap lambatnya respon ini bahkan diakui secara langsung oleh pimpinan kepolisian, yang menyatakan bahwa anggapan tersebut muncul karena penanganan aduan masyarakat yang berjalan lambat dan perlu diperbaiki agar lebih responsif terhadap semua jenis laporan tanpa menunggu viralitas (Antara, 2025).

Contoh lain yang lebih spesifik terjadi dalam kasus penanganan awal TKP pembunuhan Brigadir J. dalam kasus ini, 31 personel Polri terbukti melanggar kode etik karena ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan olah TKP awal, termasuk pengambilan dan pengaburan barang bukti, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama bagi tim khusus untuk mengungkap fakta sebenarnya (detik, 2022). Proses yang terhambat ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam identifikasi dan pengelolaan TKP pada tahap awal dapat memperlambat keseluruhan proses penyidikan dan memengaruhi persepsi public terhadap efektivitas penanganan perkara (Detik, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Direktur Reserse Kriminal (Dirreskrim) Polda Jatim, jajaran Reserse Kriminal menangani puluhan ribu kasus tindak pidana dalam setahunnya, dengan tingkat penyelesaian yang tinggi lebih dari 26 ribu kasus telah diselesaikan pada semester I tahun 2025. Beban kerja tersebut menuntut efisiensi dan kecepatan dalam setiap tahapan penyidikan. Kasus yang ditangani beragam, mulai dari kejahatan konvensional hingga kasus menonjol seperti tindak pidana korupsi dan kejahatan siber yang semakin meningkat kompleksitasnya. Hal ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang terus berkembang.

Perwira Pertama (Pama) di Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengemban tugas yang esensial, mencakup peran kepemimpinan, operasional lapangan, dan pelayanan publik langsung. Tugas ini berat karena mereka menjadi ujung tombak Polri dalam berinteraksi dengan masyarakat dan menegakkan hukum di tingkat bawah, sekaligus menjalankan fungsi manajerial di unit masing-masing. Secara keseluruhan, tekanan akibat volume dan kompleksitas kasus pidana di Polda Jatim menuntut para Perwira Pertama, berada dalam posisi strategis sebagai jembatan antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan di lapangan. Sifat pekerjaan kepolisian yang kompleks, dinamis, dan berisiko tinggi. Perwira Pertama Polri sering dihadapkan pada situasi lapangan yang ambigu, penuh tekanan, dan berisiko tinggi, di mana keputusan harus diambil dengan cepat tanpa informasi yang lengkap. Situasi seperti pengejaran berkecepatan tinggi atau penanganan tindak anarki memerlukan penilaian cepat yang dapat berdampak besar

Lebih jauh, tekanan dari atasan, lingkungan organisasi, serta ekspektasi publik turut memengaruhi proses pengambilan keputusan. Pama sering berada dalam dilema antara kepatuhan terhadap perintah pimpinan, kepentingan institusi, dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat serta hukum. Fenomena ini menggambarkan adanya *ethical dilemma* dalam praktik kepemimpinan di level pertama, di mana keputusan yang diambil tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari nilai etika dan dampak sosialnya. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan era digital menjadikan setiap keputusan atau tindakan kepolisian terekspos secara luas di ruang publik. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis tambahan bagi Pama, yang seringkali lebih memilih keputusan “aman secara citra” dibandingkan yang paling efektif secara operasional.

Pengambilan keputusan merupakan salah satu aspek penting dalam kinerja perwira pertama (Pama) di Polda Jawa Timur. Keputusan yang diambil di lapangan sering kali harus dilakukan dalam kondisi tekanan tinggi, risiko besar, dan keterbatasan informasi, sehingga kemampuan untuk menentukan opsi yang tepat menjadi sangat penting. Namun, berdasarkan penelitian awal melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pra-survei, ditemukan bahwa para Pama mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, terutama ketika dihadapkan pada situasi kompleks dan mendesak. Wawancara semi-terstruktur dengan lima Pama di Polda Jawa Timur mengungkapkan beberapa kendala yang signifikan, antara lain: Informasi tidak lengkap atau ambigu, yang menimbulkan kebingungan dan keraguan. Dalam banyak situasi operasional, Pama dihadapkan pada kondisi di mana informasi awal yang diperoleh bersifat tidak lengkap, ambigu, atau belum

terverifikasi, seperti keterangan saksi yang minim, bukti awal yang belum kuat, atau kondisi tempat kejadian perkara (TKP) yang telah berubah. Kondisi tersebut menyebabkan Pama tidak dapat melakukan analisis secara komprehensif dan rasional sebagaimana yang diharapkan dalam situasi ideal. Akibatnya, keputusan yang diambil sering kali bersifat *satisficing*, yaitu memilih alternatif yang dianggap paling aman dan cukup memadai dalam keterbatasan waktu dan informasi, bukan keputusan yang paling optimal.

Beberapa pernyataan yang menggambarkan kesulitan ini adalah:

Inisial: GE, 35 tahun

"Saya merasa pengambilan keputusan di lapangan sering kali menimbulkan kebingungan karena informasi yang diperoleh tidak lengkap atau tidak jelas. Saya harus cepat memutuskan, tapi kadang data yang ada membuat saya ragu apakah sudah tepat. Hal ini sangat menekan terutama dalam situasi darurat. Seringkali keterangan dari saksi di Lokasi juga berbeda-beda atau tidak lengkap. Ada yang melihat Sebagian kejadian saja, ada juga yang ragu menyampaikan informasi. Kondisi ini membuat saya harus mengambil Keputusan berdasarkan informasi yang terbatas."

Inisial: FM, 33 tahun

"Sering kali saya kesulitan mengatur waktu dan mengolah semua data yang ada. Tekanan dari atasan dan risiko kesalahan membuat saya berhati-hati, tapi bukan berarti lebih efektif karena keputusan jadi lama diambil. Rasanya seperti dikejar waktu, tapi tidak punya semua alat untuk mengambil keputusan terbaik. Di lapangan, informasi dari saksi kadang belum terkumpul seluruhnya, sementara situasi menuntut Tindakan cepat. Saya harus memproses data yang ada meskipun belum lengkap, karena menunggu keterangan saksi yang lebih jelas seringkali tidak memungkinkan."

Inisial: WS, 35 tahun

"Pengambilan keputusan itu rumit karena berpengaruh pada banyak orang. Namun, keterbatasan pengalaman dan tekanan di tempat tugas membuat saya takut mengambil keputusan langsung. Kadang saya khawatir konsekuensinya, apalagi kalau risikonya cukup tinggi. Apalagi jika informasi dari saksi masih minim atau tidak konsisten, saya jadi semakin ragu. Tanpa Gambaran kejadian yang utuh dari saksi, saya merasa dasar yang saya miliki untuk menentukan Langkah masih terbatas."

Inisial: AE, 36 tahun

"Banyak aturan dan budaya organisasi yang membatasi fleksibilitas saya dalam memilih opsi. Ini kadang membuat keputusan terhambat, padahal kondisi di lapangan butuh tindakan cepat. Saya merasa sulit untuk berinovasi atau mengambil risiko tanpa ada jaminan. Situasi ini semakin sulit Ketika keterangan saksi belum jelas atau belum bisa diverifikasi. Saya akhirnya hanya mengandalkan informasi yang tersedia saat itu, meskipun saya sadar informasi tersebut belum sepenuhnya lengkap."

Inisial: R, 34 tahun

"Evaluasi risiko dalam pengambilan keputusan bukan hal mudah. Risiko yang besar membuat saya cenderung memilih amannya, walaupun tidak optimal. Hal ini membuat tugas saya lebih berat karena harus menyeimbangkan antara keselamatan dan kecepatan. Kurangnya saksi di lapangan juga mempengaruhi pertimbangan saya. Karena data yang diperoleh terbatas, saya memilih Langkah yang paling aman untuk menghindari kesalahan yang bisa berdampak lebih besar."

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Pama tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan di lapangan dihadapkan pada berbagai kendala kognitif, situasional, dan struktural. Informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas menyebabkan kebingungan dan keraguan dalam menentukan pilihan, terutama dalam situasi darurat yang menuntut kecepatan dan ketepatan. Tekanan dari atasan, risiko kesalahan, serta keterbatasan waktu dan pengalaman menimbulkan beban psikologis yang tinggi. Kondisi ini membuat pengambilan

keputusan menjadi hati-hati namun tidak selalu efektif, karena prosesnya justru menjadi lambat dan penuh keraguan.

Keterbatasan informasi dari saksi dilapangan mulai dari keterangan saksi yang tidak konsisten, tidak lengkap, atau sulit diverifikasi membuat Pama tidak memiliki gambaran situasi yang utuh. Dalam kondisi tersebut, Pama terpaksa mengandalkan informasi yang tersedia saat itu, meskipun disadari bahwa informasi tersebut belum sepenuhnya memadai. Situasi ini mencerminkan keterbatasan rasionalitas individu dalam memproses informasi secara optimal Ketika dihadapkan pada tekanan waktu dan kompleksitas situasi lapangan. Selain itu, budaya organisasi dan aturan yang relatif kaku membatasi fleksibilitas Pama dalam mengeksplorasi alternatif tindakan ketika informasi saksi belum lengkap. Akibatnya, Pama cenderung memilih langkah yang dianggap paling aman sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan informasi dan risiko yang ada serta menghambat inovasi dalam pengambilan keputusan. Temuan awal ini menjadi dasar yang kuat untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.

Selain wawancara, pra-survei terhadap 74 responden menunjukkan distribusi kemampuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kategori Hasil Pra Survei Pengambilan Keputusan

Kategori Pengambilan Keputusan	Jumlah Responden	Persentase
Sangat Rendah	5	6,8%
Rendah	30	40,5%
Sedang	15	20,3%
Tinggi	18	24,3%
Sangat Tinggi	6	8,1%
Jumlah	74	100%

Hasil pra-survei menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori rendah, yaitu sebanyak 30 responden (40,5%), sementara 15 responden (20,3%) berada pada kategori sedang. Adapun responden yang berada pada kategori tinggi berjumlah 18 responden (24,3%). Responden yang berada pada kategori sangat tinggi berjumlah 6 responden (8,1%) dan responden yang berada pada kategori sangat rendah berjumlah 5 responden (6,8%). Distribusi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pengambilan keputusan pada Pama cenderung rendah, sehingga mengindikasikan adanya permasalahan pada variabel pengambilan keputusan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa Pama masih mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, terutama pada situasi yang bersifat mendesak atau mengandung risiko tinggi. Kesulitan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan situasional, tetapi juga oleh keterbatasan informasi yang diperoleh di lapangan, khususnya informasi dari saksi yang sering kali tidak lengkap, tidak konsisten, atau sulit diverifikasi. Kondisi ini membatasi kemampuan Pama untuk membangun pemahaman situasi secara menyeluruh dalam waktu singkat.

Dengan demikian, hasil pra-survei dan wawancara ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan di lingkungan Polda Jawa Timur masih belum optimal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik individu, situasional, maupun struktural. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan, sehingga dapat dirumuskan

strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Pama di lapangan.

Hasil penelitian Negoro dan Koentjoro (2018) menunjukkan penyidik diharuskan dapat mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada tanpa terpengaruhi tendensi tertentu, terutama pada saat situasi berisiko. Keputusan tidak boleh diambil berdasarkan tekanan situasi atau intervensi dari pihak tertentu. Berdasarkan data Litbang Polri (2024) secara empiris terdapat fenomena signifikan yang menunjukkan bahwa efektivitas pengambilan keputusan pada Pama Polda Jatim masih belum optimal. Kompleksitas tugas yang dihadapi mengharuskan Pama mempertimbangkan banyak faktor sekaligus dalam waktu yang terbatas, sementara informasi yang diperoleh sering kali tidak lengkap atau ambigu. Tekanan lingkungan kerja termasuk aturan organisasi, budaya birokrasi yang kaku, dan norma sosial turut membatasi ruang gerak Pama dalam menentukan keputusan. Keterbatasan ini menyebabkan adanya ketidakpastian, keraguan, dan kadang penundaan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada efektivitas tugas kepolisian serta citra institusi di mata masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hambatan pengambilan keputusan Pama di Polda Jatim.

Pengambilan keputusan merupakan aktivitas yang kompleks dan dinamis yang melibatkan beberapa tahapan dan aspek penting (Ranyard et.al., 1997). Pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks dan esensial, di mana pemilihan tindakan dari beberapa alternatif dilakukan untuk mencapai tujuan

tertentu (Umar, 2024). Pengambilan keputusan didefinisikan sebagai proses memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu (Pasolong, 2023). Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan. Pengambilan keputusan dalam psikologi kognitif difokuskan kepada bagaimana seseorang mengambil keputusan. Dalam kajiannya, berbeda dengan pemecahan masalah yang mana ditandai dengan situasi dimana sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas dan dimana pencapaian sebuah sasaran diuraikan menjadi sub tujuan, yang pada saatnya membantu menjelaskan tindakan yang harus dan kapan diambil (Desmita, 2008).

Menurut Ranyard, et all. (1997) lima aspek pengambilan keputusan, yaitu:

- 1). Keadaan (*circumstances*) yang merupakan keadaan dimana individu akan menerima masukan dari orang lain dan pandangan lingkungan sekitar mengenai keputusan yang akan dibuatnya.
- 2). Preferensi (*preferences*) merupakan tujuan, harapan dan keinginan yang akan dicapai dari keputusannya.
- 3). Emosi (*emotions*) yang dapat mendorong individu untuk berpikir dan bertindak pada berbagai alternatif pilihan yang ada dan emosi dapat memberikan umpan balik terhadap alternatif pilihan pada keputusan.
- 4). Tindakan (*action*) yakni dalam mengambil keputusan perlu adanya sesuatu hal yang mendukung.
- 5). Hipotesis individu (*beliefs*) dimana Individu harus memiliki hipotesa, keyakinan dan mengetahui konsekuensi dari keputusan yang akan diambil

Menurut Simon (1960) faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain: 1. keterbatasan informasi (*limited information*). Keterbatasan informasi ini menyebabkan pengambil keputusan hanya memiliki sebagian

informasi sehingga penilaian menjadi tidak sepenuhnya rasional. 2. Keterbatasan kognitif manusia (*cognitive limitations*). Kemampuan otak manusia untuk mengolah informasi bersifat terbatas sehingga keputusan hanya dapat dibuat dalam lingkup tertentu. 3. *Bounded rationality* (rasionalitas terbatas). Keputusan diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan analitis. 4. Prinsip *satisficing* (memilih alternatif yang "cukup memuaskan"), dalam hal ini individu cenderung memilih opsi yang cukup baik (*satisficing*) karena keterbatasan sumber daya, waktu, dan informasi. 5. Lingkungan organisasi berkaitan dengan struktur formal, prosedur, hirarki, budaya kerja, serta pola komunikasi internal memengaruhi proses keputusan. 6. Tekanan waktu berkaitan dengan batas waktu tertentu sehingga keputusan sering diambil tidak didasarkan analisis mendalam. 7. Faktor psikologis berkaitan dengan emosi, persepsi, pengalaman, bias, dan preferensi individu. 8. Tekanan sosial dan politik berkaitan dengan norma sosial, pengaruh atasan, ekspektasi kelompok, dan kepentingan politik organisasi. Lebih lanjut menurut Kahneman dan Tversky (1979), faktor faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain 1. Bias kognitif (*cognitive biases*) yang memungkinkan manusia tidak mengambil keputusan secara rasional, tetapi dipengaruhi berbagai bias kognitif, 2. Persepsi risiko (*risk perception*) berdasarkan persepsi subjektif yang dipengaruhi oleh domain keuntungan/kerugian, distorsi probabilitas, dan sensitivitas risiko.

Penelitian ini menggunakan variabel *bounded rationality* (rasionalitas terbatas) untuk menjelaskan bagaimana pengambil keputusan tidak selalu bertindak secara sepenuhnya rasional. Hal ini didasarkan pada pendapat Simon (1960) bahwa

rasionalitas manusia pada dasarnya selalu berada dalam batasan tertentu. Pengambil keputusan tidak mampu memproses seluruh informasi yang tersedia secara komprehensif karena adanya keterbatasan informasi, keterbatasan kognitif, dan tekanan situasional. Dalam konteks penelitian ini, *bounded rationality* penting karena menunjukkan bahwa keputusan aktor tidak dapat dipahami semata-mata melalui logika rasional yang sempurna. Keputusan dipengaruhi oleh keterbatasan persepsi, kapasitas pemrosesan informasi, preferensi yang terbentuk dari pengalaman, serta kondisi organisasi dan lingkungan. Dengan kata lain, *bounded rationality* berperan sebagai kerangka yang menjelaskan bagaimana keterbatasan-keterbatasan tersebut membentuk kualitas dan arah keputusan.

Menurut Simon (1960), *bounded rationality* atau rasionalitas terbatas adalah kondisi ketika pengambil keputusan tidak mampu mencapai tingkat rasionalitas yang sempurna karena adanya keterbatasan informasi, keterbatasan kemampuan kognitif individu dalam memproses informasi, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Menurut Gigerenzer dan Selten (2001) *bounded rationality* sebagai penggunaan *heuristik* yang adaptif, yaitu aturan sederhana yang digunakan manusia untuk membuat keputusan secara efektif dalam kondisi informasi terbatas. Menurutnya, keterbatasan bukan kelemahan, melainkan strategi adaptif yang efisien.

Menurut Simon (1960) aspek *bounded rationality* meliputi: 1. *Satisficing*: pengambil keputusan mencari solusi yang "cukup baik" daripada yang optimal. 2. *Heuristics*: penggunaan aturan praktis atau "jalan pintas mental" dalam pengambilan keputusan. 3. Adaptasi: strategi pengambilan keputusan disesuaikan

dengan lingkungan dan keterbatasan kognitif. Lebih lanjut Simon (1960) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *Bounded Rationality* adalah

1. Keterbatasan informasi yang bermakna informasi tidak lengkap, tidak pasti, dan tidak selalu dapat diakses.
2. Keterbatasan kognitif yang mana kemampuan manusia untuk memproses informasi sangat terbatas.
3. Keterbatasan waktu dan sumber daya sehingga keputusan sering harus diambil dalam situasi waktu terbatas.
4. Kompleksitas lingkungan yang ditandai dengan semakin kompleks masalah, semakin besar batasan rasionalitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Desiana, et al., (2025) yang berjudul pengaruh rasionalitas terbatas terhadap pengambilan keputusan, hasil yang didapatkan Adalah rasionalitas terbatas menunjukkan bahwa manusia tidak selalu mampu mengambil keputusan secara sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan kognitif. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Karyaadi, et al., (2024) yang berjudul evaluasi penerapan teori *bounded rationality* dalam proses pengambilan keputusan manajerial menunjukkan hasil bahwa penerapan teori *bounded rationality* dalam proses pengambilan keputusan sangat berguna, terutama dalam memahami dan menjelaskan perilaku pengambilan keputusan yang mungkin tidak optimal, tetapi cukup efisien dan adaptif sesuai kebutuhan konteks.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah *risk perception*. Hal ini sesuai pendapat Kahneman dan Tversky (1979), *risk perception* sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena manusia tidak mengevaluasi pilihan secara objektif berdasarkan nilai akhir (*final outcomes*), tetapi

berdasarkan cara mereka memersepsikan risiko, terutama bagaimana mereka menilai keuntungan dan kerugian secara psikologis. Menurut Kahneman dan Tversky (1979), *risk perception* adalah penilaian subjektif individu terhadap kemungkinan kerugian dan keuntungan, yang dibentuk oleh *framing*, *heuristik*, dan bias kognitif. Individu tidak menilai risiko secara objektif, melainkan berdasarkan bagaimana mereka memersepsikan potensi kerugian (*losses*) dan keuntungan (*gains*). Menurut Slovic (1987) *risk perception* merupakan penilaian intuitif, emosional, dan subjektif yang digunakan individu untuk mengevaluasi tingkat bahaya atau ketidakpastian, yang dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti rasa takut, pengalaman, kontrol, dan kepercayaan.

Berdasarkan teori *risk perception* atau persepsi resiko dijelaskan bahwa cara individu menilai risiko sangat dipengaruhi oleh persepsi subjektif yang terbentuk dari pengalaman, *framing* informasi, dan bias kognitif. *Risk perception* yang tinggi biasanya menimbulkan kehati-hatian berlebihan dalam pengambilan keputusan, sementara *Risk perception* rendah dapat menyebabkan pengambilan keputusan berani. *Risk perception* yang salah atau tidak proporsional dapat memperlambat atau memengaruhi keputusan yang diambil, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif (Kahneman & Tversky, 1979). Bagaimana individu menilai risiko mempengaruhi keberanian dan kecenderungan dalam membuat keputusan, terutama dalam konteks tugas yang memerlukan penilaian risiko cepat dan akurat. *risk perception* ini merupakan faktor psikologis utama yang memengaruhi proses pengambilan keputusan (Kahneman & Tversky, 1979).

Aspek-aspek *risk perception* yang dijelaskan pada *prospect theory*, yaitu 1) *Loss aversion* yang bermakna orang biasanya lebih takut rugi daripada senang mendapat untung. Individu yang tidak ingin merasa kehilangan walaupun secara bersamaan ada peluang untuk mendapat keuntungan yang lebih besar karena perasaan negatif dari kehilangan lebih jauh mengganggu. 2) *Self control* yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengendalikan diri dari dorongan impulsif dalam pengambilan keputusan, seperti menunda kepuasan jangka pendek demi tujuan jangka panjang yang lebih baik. 3) *Regret aversion* yang bisa mempengaruhi cara orang membuat keputusan investasi, seringkali membuat mereka memilih opsi yang lebih aman, meskipun itu mungkin bukan pilihan terbaik. 4) *Probability weighting* yang menjelaskan bahwa individu cenderung mempersepsikan probabilitas suatu kejadian secara tidak objektif, seperti melebih-lebihkan kemungkinan kejadian kecil dan meremehkan kemungkinan kejadian besar. 5) *Decision framing* yang menunjukkan bahwa cara suatu risiko atau pilihan disajikan (dibingkai) dapat memengaruhi persepsi risiko dan keputusan yang diambil, meskipun substansi pilihan tersebut sebenarnya sama (Kahneman & Tversky, 1979).

Faktor faktor yang mempengaruhi *risk perception* menurut Kahneman dan Tversky (1979), antara lain : 1. *Framing effect* yaitu cara penyajian informasi memengaruhi apakah individu menghindari atau mengambil risiko. 2. *Loss aversion* yaitu kerugian terasa lebih berat daripada keuntungan memperkuat persepsi risiko. 3. *Heuristics* yaitu keputusan cepat berbasis intuisi memengaruhi interpretasi risiko. 4. *Probability weighting* berupa penilaian probabilitas bersifat

subjektif, tidak sesuai fakta. 5. *Reference point* yaitu persepsi risiko bergantung pada titik acuan psikologis. 6. *Contextual factors* yaitu situasi dan struktur pilihan mengubah *risk perception*.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agusta dan Yanti (2022) yang berjudul pengaruh *risk perception* dan *herding* terhadap pengambilan keputusan investasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa *risk perception* berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Irowati (2021) dengan judul pengaruh *risk perception*, *regret aversion*, *bias perception*, dan *overconfidence* terhadap pengambilan keputusan investasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa *risk perception* memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan investasi.

Hidayat (2021) menegaskan bahwa keterbatasan rasionalitas menyebabkan pengambil keputusan sering hanya mengejar hasil yang memuaskan (*satisficing*) daripada optimal. Sementara itu, penelitian Kahneman dan Tversky (1979), menjadi landasan memahami aspek psikologis dalam pengambilan keputusan melalui *prospect theory*. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak bisa dilepaskan dari konteks kognitif dan emosional. Dengan demikian, studi ini berupaya mengintegrasikan dua faktor kunci *bounded rationality* dan *risk perception* untuk memahami tantangan kognitif dan emosional yang dihadapi Pama Polda Jatim dalam mengambil keputusan operasional di bawah tekanan organisasi dan ketidakpastian situasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengkaji tentang pengaruh *bounded rationality* dan *risk perception* terhadap kemampuan pengambilan keputusan pada Pama Polda Jatim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas Pama Polda Jatim mengalami kesulitan dalam melakukan pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan efektif, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hubungan antara *Bounded Rationality* dengan Pengambilan Keputusan pada Pama Polda Jatim?.
2. Bagaimana hubungan antara *Risk Perception* dengan Pengambilan Keputusan pada Pama Polda Jatim?.
3. Bagaimana hubungan antara *Bounded Rationality* dan *Risk Perception* dengan Pengambilan Keputusan pada Pama Polda Jatim?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui hubungan antara *Bounded Rationality* dengan Pengambilan Keputusan pada Pama Polda Jatim.
2. Untuk mengetahui hubungan antara *Risk Perception* dengan Pengambilan Keputusan pada Pama Polda Jatim.
3. Untuk mengetahui hubungan antara *Bounded Rationality* dan *Risk Perception* dengan Pengambilan Keputusan pada Pama Polda Jatim.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam pengembangan kajian *bounded rationality* dan *risk perception* dalam konteks pengambilan keputusan di organisasi formal, khususnya di lingkungan kepolisian. Penelitian ini memperluas pemahaman teoritis mengenai bagaimana keterbatasan kognitif, tekanan situasional, serta persepsi risiko berinteraksi dalam membentuk kualitas pengambilan keputusan individu.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur psikologi dan manajemen keputusan di Indonesia dengan menghadirkan konteks empiris yang masih relatif terbatas, yaitu pada Perwira Pertama (Pama) Polri. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual bagi pengembangan model penelitian selanjutnya yang mengintegrasikan *bounded rationality*, *risk perception*, serta variabel psikologis dan organisasi lainnya dalam menjelaskan perilaku pengambilan keputusan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Polda Jatim

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor psikologis yang memengaruhi pengambilan keputusan anggota Polri,

khususnya terkait keterbatasan rasionalitas dan persepsi risiko. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh Polda Jawa Timur sebagai bahan evaluasi dalam merancang kebijakan, sistem kerja, serta program pelatihan yang lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Dengan memahami pola *bounded rationality* dan *risk perception* yang dimiliki anggota, institusi dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang lebih efektif, proporsional, dan responsif terhadap situasi kerja yang kompleks.

b. Bagi Pama Polda Jatim

Bagi Pama, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri (*self-awareness*) terhadap keterbatasan rasionalitas dan persepsi risiko yang dimiliki dalam menjalankan tugas. Pemahaman tersebut dapat membantu Pama dalam mengembangkan kemampuan analisis, pengelolaan tekanan psikologis, serta pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan bertanggung jawab. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi bagi Pama untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam bertindak secara profesional dengan tetap mempertimbangkan risiko dan keterbatasan informasi yang ada.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan empiris dan konseptual bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pengambilan keputusan dalam konteks organisasi publik maupun organisasi lain yang memiliki karakteristik kerja berisiko tinggi. Selain itu, penelitian ini membuka

peluang pengembangan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain, seperti tekanan kerja, dukungan organisasi, pengalaman kerja, atau budaya organisasi, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang psikologi dan manajemen keputusan.

